

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 masih diwarnai dengan berbagai permasalahan yang cukup mendasar, yaitu:

**Pertama**, Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran

Informasi ketenagakerjaan menunjukkan berapa besar jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah penganggur atau pencari kerja. Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2018 meningkat 1,08 poin yaitu dari 69,09 persen pada Agustus 2017 menjadi 70,17 persen pada Agustus

2018. Secara nasional TPAK Indonesia pada Agustus 2018 mencapai 67,26 persen, lebih rendah dibanding TPAK NTT. TPAK laki-laki sebesar 80,96 persen lebih tinggi dibanding perempuan 59,86 persen. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Penduduk yang bekerja di NTT pada Agustus 2018 mencapai 2,41 juta orang, bertambah 91,5 ribu orang dibanding keadaan pada Agustus 2017 sebesar 2,32 juta orang.

**Kedua**, Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan

(baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) NTT Agustus 2018 sebesar 3,01 persen dari total angkatan kerja. Angka ini lebih rendah 0,26 poin dibanding Agustus 2017 sebesar 3,27 persen. Secara nasional TPT Indonesia pada Agustus 2018 mencapai 5,34 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT NTT.

**Ketiga,** Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama menjadi salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Distribusi penduduk yang bekerja berdasarkan Klasifikasi

Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) 2015 pada Agustus 2018 relatif sama dengan Agustus 2017 dimana sebagian besar penduduk menekuni kategori A Pertanian sebesar 1,32 juta orang (54,73 persen), diikuti kategori E Perdagangan sebesar 0,23 juta orang (9,64 persen), kategori C Industri sebesar 0,22 juta orang (8,96 persen), kategori P Jasa Pendidikan sebesar 0,13 juta (5,47 persen), dan kategori O Administrasi Pemerintahan sebesar 0,12 juta orang (5,12 persen). Sebaliknya kategori yang paling sedikit menampung pekerja adalah gabungan kategori Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; dan Jasa Perusahaan (J,K,M,N) sebesar 38,5 ribu orang (1,60 persen) dan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q) sebesar 35,6 ribu orang (1,48 persen)

**Keempat,** Dari 2,41 juta orang yang bekerja pada Agustus 2018, sebagian besar bekerja dengan pendidikan kurang dari atau sama dengan SD yaitu sebesar 56,78 persen. Selain itu komposisi pendidikan dari penduduk bekerja yaitu SMP (12,50 persen), SMA Umum (14,61 persen), SMA Kejuruan (5,83 persen), Diploma I/II/III (2,36 persen) dan Universitas (7,92 persen). Dilihat menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT terendah adalah yang berpendidikan SD kebawah sebesar 0,85 persen dan SMP sebesar 1,78 persen. Sedangkan TPT tertinggi dengan pendidikan Universitas sebesar 7,81 persen selanjutnya SMA Umum sebesar 7,54 persen.

**Kelima**, tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Kelima permasalahan diatas pada hakekatnya saling kait mengkait, dimana kualitas angkatan kerja yang rendah disatu sisi mengakibatkan rendahnya daya saing mereka di pasar kerja disisi lain juga mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi regional yang kurang memadai sehingga kurang mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerja yang tiap tahun senantiasa terus bertambah. Selain itu tingkat kemandirian yang rendah juga turut berperan terhadap tingginya angka penganggur dan setengah penganggur di Nusa Tenggara Timur.

**Terkait sektor pemberdayaan Koperasi dan UKM**, perkembangan jumlah Koperasi di Provinsi NTT selama periode Tahun 2014–2018 mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2015 jumlah Koperasi sebanyak 3.907 unit dan meningkat sebanyak 577 unit (126,27 %) menjadi 4.148 unit pada akhir tahun 2018, sedangkan jumlah koperasi aktif sampai tahun 2018 sebanyak 3.635 unit atau 0,96% dari total jumlah Koperasi. Sedangkan pertumbuhan rata-rata koperasi selama 5 (lima) tahun sebanyak 254,6 atau sebesar 20%, dan pertumbuhan rata-rata Koperasi aktif sebanyak 213,4 atau sebesar sebesar 1.64%. Dari sisi jumlah anggota koperasi pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun tidak terlalu signifikan pada tahun 2014 sebanyak 698.470 orang tahun 2018 menjadi 1.741.459 orang pertumbuhan sebesar 1,14%, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih sangat rendah. Dari sisi penyerapan tenaga kerja (Manajer dan Karyawan) tahun 2014 sebanyak 8,107 orang pada tahun 2018 bertambah menjadi 12.686 orang dengan pertumbuhan sebesar 1,14%, pertumbuhan tenaga kerja masih kecil disebabkan karena usaha koperasi belum berkembang dengan baik. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi

persentase terus mengalami peningkatan tahun 2014 persentase Koperasi aktif yang melakukan RAT sebanyak 1.974 dan tahun 2018 jumlah koperasi aktif yang melakukan RAT sebanyak 1.448 atau rata-rata selama 5 tahun sebesar 1,03%.

Dari sisi permodalan, jumlah modal sendiri koperasi selama periode waktu 5 (tahun) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,39%, dimana tahun 2014 sebesar Rp. 1.626.519.167,- meningkat sebesar Rp. 3.021.724.920.803,- sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp 3.023.351.439.970. Modal luar Koperasi selama periode 5 (lima) tahun mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,27%. Pertumbuhan Asset Koperasi rata-rata selama 5 (lima) tahun sebesar 1,30%, volume usaha koperasi juga mengalami pertumbuhan selama 5 (lima) tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,19%. Sisa Hasil Usaha Koperasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,04%.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Program Kerja ini disusun sebagai arahan, pedoman dan alat evaluasi bagi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program pembangunan dengan harapan seluruh sasaran kegiatan dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta dapat terlaksana secara efisien, tertib dan terkendali.

## **C. SISTIMATIKA PENULISAN**

Program Kerja ini berisikan pokok-pokok program dan kegiatan serta target-target sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) dilingkungan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

Sistematika Penulisan Program Kerja ini adalah sebagai berikut :

- BAB. I.       Pendahuluan.
- BAB. II.       Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
- BAB. III.       Strategi dan Kebijakan.
- BAB. IV.       Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- BAB. V        Program Kerja.
- BAB. VI.       Dukungan Operasional.
- BAB. VII.       Penutup.

## **BAB II**

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

### **A. VISI**

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sesuai dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.**

Berdasarkan Visi tersebut diatas, maka Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pada

### **B. MISI**

Misi ke-1 (satu), yaitu: “Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil”. Apabila misi pertama ini diturunkan pada Tujuan RPJMD, maka yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT adalah pada tujuan pertama, yaitu: Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah dan sasaran ketigayaitu terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk. Sedangkan strategi pencapaiannya melalui Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja, Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kecil/kategori miskin, dan Peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Dengan demikian fokus pembangunan dibidang koperasi, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama periode RPJMD Tahun 2019–2023 adalah sebagai berikut:

Reformasi total koperasi dilakukan mencakup semua aspek mulai dari membenahan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia koperasi. Reformasi total koperasi menyangkut 3 aspek yaitu: Rehabilitasi Koperasi, Reorientasi Koperasi dan Pengembangan Koperasi;

Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional serta peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM;

Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, meliputi ketrampilan, produktivitas dan penempatan perluasan kesempatan kerja;

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, yaitu meliputi pengembangan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ pemutusan hubungan kerja, pengupahan, jaminan sosial, pengawasan norma kerja dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta penanganan calon TKI dan tenaga kerja bermasalah;

Masih tersedianya lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga mampu meningkatkan program transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat membantu kemandirian ekonomi masyarakat miskin;

Meningkatkan keterampilan masyarakat transmigrasi dalam mengolah lahan dan mengembangkan perekonomiannya.

## **A. TUJUAN**

Mengacu pada Visi dan Misi Dinas koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 - 2023 maka tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Koperasi sebagai kelembagaan ekonomi yang kuat dan bersifat inklusif;
2. Meningkatkan pengembangan produk unggulan daerah, melalui peningkatan akses permodalan, peningkatan kemitraan dengan usaha besar, peningkatan kualitas keterampilan (live skill) pelaku UKM, serta penumbuhan wirausaha baru;
3. Mengelola dan mengembangkan bidang usaha berbasis potensi lokal yang mampu meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan produksi, nilai tambah, dan perluasan kesempatan kerja;
4. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan efisien serta penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya;
5. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat serta meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial;
6. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair to treatment), profesional dan seragam diseluruh Nusa Tenggara Timur;
7. Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi hunian yang cepat tumbuh, cepat berkembang, layak usaha, dengan lingkungan yang serasi dan terlaksananya pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan kompetensinya.

## **B. SASARAN**

1. Menjadikan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota);
2. Meningkatnya jumlah UKM melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar;
3. Terwujudnya UKM baru di lokasi pariwisata melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM pelaku UKM;

4. Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya;
5. Terciptanya Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Terwujudnya perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan;
7. Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran.

## **BAB. III**

# **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dibidang koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian maka Strategi dan Kebijakan Tahun 2018–2023 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

### **5.1. STRATEGI**

Sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis diatas maka Strategi Pembangunan koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui revitalisasi kelembagaan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan koperasi;
2. Strategi Peningkatan permodalan UKM melalui fasilitasi temu pembiayaan, pendampingan penyusunan rencana usaha/studi kelayakan usaha serta mendorong kemitraan dengan badan usaha lainnya;
3. Strategi peningkatan jumlah wirausaha pemula melalui peningkatan kualitas SDM dan anggota kelompok usaha bersama yang berbasis pada potensi sumber daya lokal;
4. Strategi Peningkatan kompetensi, kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
5. Strategi Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja;
6. Strategi Pengelolaan iklim kerja yang kondusif dan penguatan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan bermartabat;
7. Strategi Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan;

8. Strategi Pembangunan kawasan transmigrasi, pembinaan, pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi.

## 5.2. KEBIJAKAN

Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM pengelola, pengurus, pengawas dan anggota sehingga tercipta koperasi yang sehat dan aktif;
2. Peningkatan keterampilan pelaku UKM melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pelatihan keterampilan serta melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan UKM;
3. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta peningkatan managerial kewirausahaan pelaku UKM di lokasi pariwisata;
4. Peningkatan kompetensi, kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausahawan baru yang berdaya saing;
5. Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri;
6. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis;
7. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum;
8. Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam pedesaan terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk wilayah pengembangan transmigrasi (WTP) atau lokasi pemukiman transmigrasi (LPT), serta fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi;

9. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan pedesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi;

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 adalah sebagaimana pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1				
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan				
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT				
Tahun 2019-2023				
Visi: NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia				
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1 Mengembangkan Koperasi sebagai kelembagaan ekonomi yang kuat dan bersifat inklusif	1 Menjadikan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota)	1.1 Strategi peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui revitalisasi kelembagaan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan koperasi	1.1 Peningkatan SDM pengelola, pengurus, pengawas dan Anggota sehingga tercipta koperasi yang sehat dan aktif	
2 Meningkatkan pengembangan produk unggulan daerah, melalui peningkatan akses permodalan, peningkatan kemitraan dengan usaha besar, peningkatan kualitas keterampilan (live skill) pelaku UKM, serta penumbuhan wirausaha baru	2 Meningkatnya jumlah UKM melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar	2.1 Strategi Peningkatan permodalan UKM melalui fasilitasi temu pembiayaan, pendampingan penyusunan rencana usaha/studi kelayakan usaha serta mendorong kemitraan dengan badan usaha lainnya.	2.1 Peningkatan ketrampilan pelaku UKM melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pelatihan ketrampilan serta melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan UKM	
3 Mengelola dan mengembangkan bidang usaha berbasis potensi lokal yang mampu meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan produksi, nilai tambah, dan perluasan kesempatan kerja	3 Terwujudnya UKM baru di lokasi pariwisata melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM pelaku UKM	3.1 Strategi peningkatan jumlah wirausaha pemula melalui peningkatan kualitas SDM dan anggota kelompok usaha bersama yang berbasis pada potensi sumber daya lokal	3.1 Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta peningkatan managerial kewirausahaan pelaku UKM di lokasi pariwisata	
4 Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan efisien serta penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya	4 Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya	4.1 Strategi Peningkatan kompetensi, kualitas dan produktivitas tenaga kerja 4.2 Strategi Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	4.1 Peningkatan kompetensi, kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausahawan baru yang berdaya saing 4.2 Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri	
5 Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat serta meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial	5 Terciptanya Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	5.1 Strategi Pengelolaan iklim kerja yang kondusif dan penguatan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan bermartabat	5.1 Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis	
6 Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair to treatment), profesional dan seragam diseluruh Nusa Tenggara Timur	6 Terwujudnya perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan	6.1 Strategi Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum	6.1 Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum	
7 Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi hunian yang cepat tumbuh, cepat berkembang, layak usaha, dengan lingkungan yang serasi dan terlaksananya pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan kompetensinya	7 Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran	7.1 Strategi Pembangunan kawasan transmigrasi 7.2 Strategi pembinaan, pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi	7.1 Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam pedesaan terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pembangunan ekonomi wilayah dalam bentuk wilayah pengembangan transmigrasi (WTP) atau lokasi pemukiman transmigrasi (LPT), serta fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi 7.2 Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan pedesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi	

## **BAB IV**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tugas pokok Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi, tenaga Kerja dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

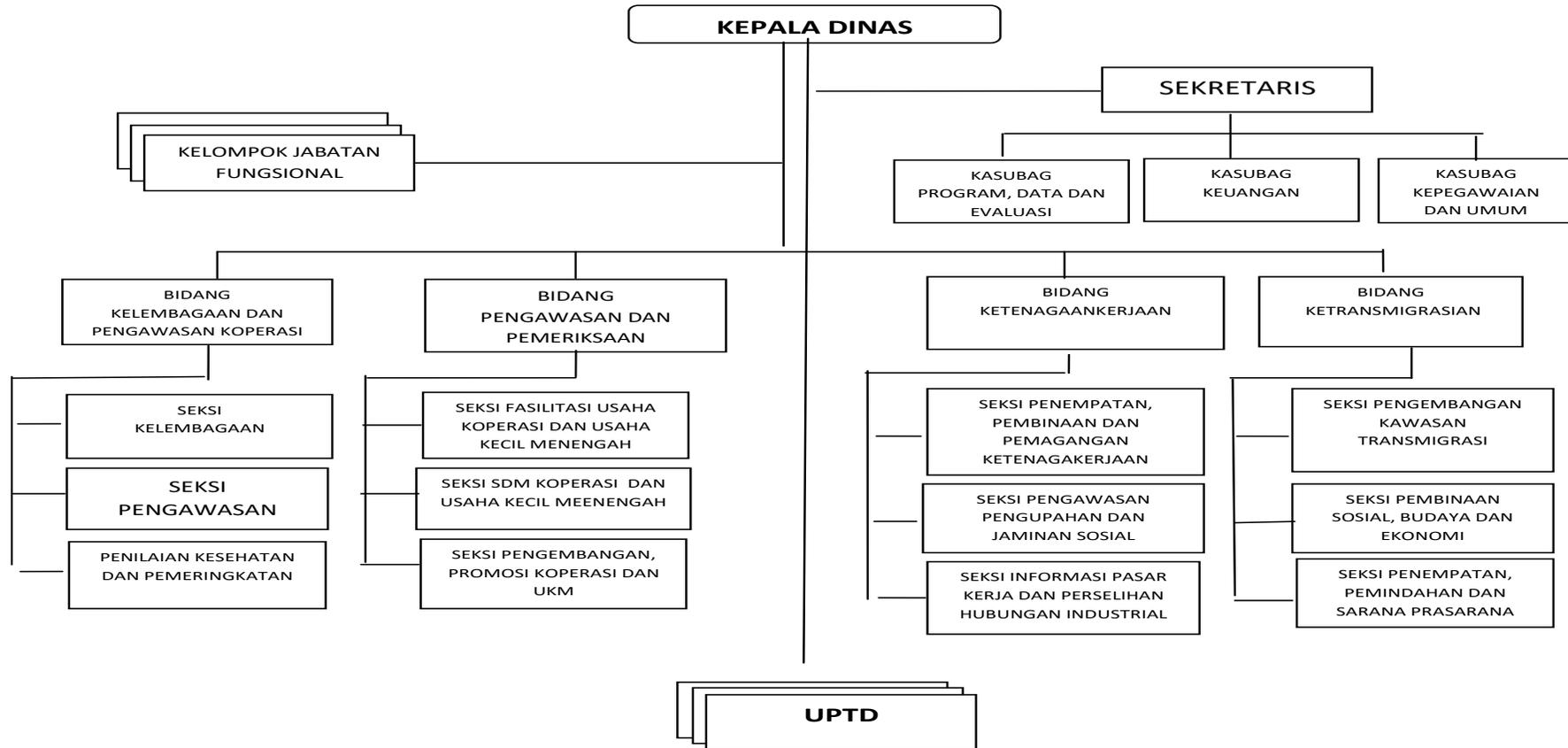
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (Satu) orang Sekretaris, 4 (Empat) orang Kepala Bidang dan 1 orang Kepala UPT, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
  - a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
  - b. Sub Bagian Keuangan, dan
  - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, terdiri atas:
  - a. Seksi Kelembagaan;
  - b. Seksi pengawasan, dan
  - c. Seksi Penilaian Kesehatan dan Pemingkatan.
3. Bidang Pemberdayaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, terdiri atas:
  - a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  - b. Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan
  - c. Seksi Pengembangan, Promosi Koperasi dan Usaha Kecil.
4. Bidang ketenagakerjaan, terdiri atas:
  - a. Seksi Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja;
  - b. Seksi Pengawasan Pengupahan dan Jaminan Sosial, dan
  - c. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial.
5. Bidang Ketransmigrasian, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
  - b. Seksi Pembinaan Sosial, Budaya dan Ekonomi, dan
  - c. Seksi Penempatan, Pindahan dan Sarana Prasarana.
6. UPT Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian tata Usaha;
  - b. Kepala Seksi pelatihan dan Promosi, dan
  - c. Kepala Seksi Pengembangan.

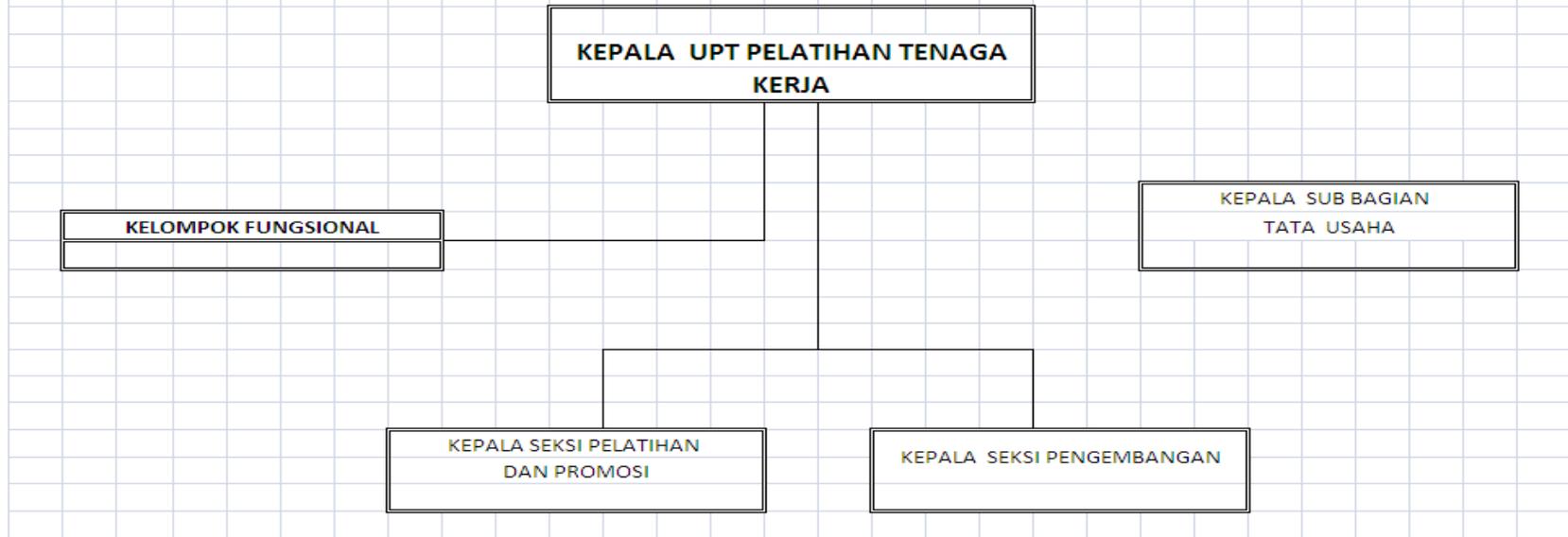
Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 10 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA  
TIMUR NOMOR : 10 TAHUN 2019  
TANGGAL 21 JANUARI 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
KOPERASI, TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR



**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PELATIHAN TENAGA KERJA  
DINAS NAKERTRANS PROVINSI NTT**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh berbagai macam sumber daya yang dimilikinya. Adapun sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut:

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Februari 2019 sebanyak 227 orang dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Unit Kerja:

- Kantor Dinas	:	185 orang
- UPT PTK	:	42 orang

Menurut Golongan:

- Golongan IV	:	27 orang
- Golongan III	:	175 orang
- Golongan II	:	36 orang
- Golongan I	:	- orang

Menurut Pendidikan:

- S2	:	23 orang
- S1	:	128 orang
- Sarmud/D3	:	18 orang
- SLTA	:	69 orang
- SLTP	:	- orang
- SD	:	- orang

# BAB V

## PROGRAM KERJA

### DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

#### A. Rencana Program/Kegiatan

##### 1. Bidang Ketenagakerjaan

#### PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik			Keuangan
			Target	Realisasi	Satuan	Pagu
	<b>PROGRAM PENINGKATAN</b>					
	<b>KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN</b>					
	<b>PRODUKTIVITAS (Dana Dekonsentrasi)</b>					
1.	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Kupang, TTS	20		LPK	41.040.000
2.	Operasional KA-LPK	Provinsi	12		Bulan	73.260.000
3.	Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri	Kota Kupang, Sikka, Flotim	100		Orang	930.000.000
4.	Pelatihan Peningkatan Produktivitas di UPTP	Ende,Sumba Barat,Nagekeo,TTU,Belu,TTS,Sikka,Malaka Rote Ndao, Alor	375		Orang	678.465.000
5.	Bimbingan Konsultasi di Provinsi NTT	TTS,Belu,TTU,Kab.Kupang,Kota Kupang	150		Orang	564.408.000
6.	Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri	Kota Kupang, Alor	50		Orang	623.400.000
7.	Pengelolaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan	Provinsi	12		Bulan	75.000.000
8.	Administrasi Kegiatan	Provinsi	12		Bulan	210.730.000
9.	Pengumpulan Data Bidang Pelatihan Produktivitas	21 Kab/Kota	1		Paket	100.750.000
10.	Bimbingan, Pengawasan dan Pembinaan	Kota Kupang	1		Paket	46.620.000
11.	Pelatihan Wirausaha Baru Produktif di Provinsi NTT	Sikka,Ende,Belu,TTS,Kab.Kupang,Mabar,Rote Ndao,ManggaraiMalaka,Sabu Raijuu,FlotimNgada,sumba	400		Orang	679.900.000
12.	AdministrasiKegiatan Bidang Produktivitas	Provinsi	12		Bulan	109.720.000
<b>JUMLAH</b>						<b>4.133.293.000</b>

**PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik			Keuangan
			Target	Realisasi	Satuan	Pagu
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA</b>					<b>539.180.000</b>
2179	<b>Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial</b>					<b>154.000.000</b>
2179.001	Pelaku Hubungan Industrial yang mendapatkan Pelatihan Teknik Negosiasi					154.000.000
053	Pelatihan Ketrampilan Bernegosiasi dalam Hubungan Industrial	Provinsi NTT (Kupang)	50		Orang	154.000.000
2181	<b>Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b>					<b>49.000.000</b>
2181.004	Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan oleh Mediator HI dalam Penyelesaian Perselisihan HI (PN)	Provinsi NTT (Kupang)	14		Perjanjian Bersama (PB)	49.000.000
052	Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan oleh Mediator HI di Daerah	Provinsi NTT (Kupang)	50		Orang	49.000.000
2183	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Tenis lainnya Ditjen Pembinaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>					<b>186.180.000</b>
2.183.001	Pelayanan Administrasi dalam rangka peningkatan kepuasan pegawai atas layanan internal Ditjen PHI dan Jamsos					186.180.000
120	Administrasi Kegiatan untuk Provinsi	Kupang, Bali, Jakarta	12		Bulan	186.180.000
5586	<b>Peningkatan penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>					<b>150.000.000</b>
5586.001	Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial					150.000.000
051	Desiminasi Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi Sektor Informal	Kupang	100		Orang	150.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>539.180.000</b>

**PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik		Keuangan	
			Target	Satuan	Pagu	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>					<b>168.830.000</b>
2197	<b>Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Pendidikan Norma</b>					<b>138.566.000</b>
2197.001	Pembinaan teknis norma ketenagakerjaan					61.262.000
102	Pembinaan pemeriksanaan ketenagakerjaan	Kota Kpg, Kab Kugp, TTS,TTU,Malaka Belu,Alor, Lembata, Flotim,Skka,Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat, Suumba Barat Daya	1	Paket		61.262.000
2197.002	Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan					48.974.000
108	Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	Provinsi NTT	1	Paket		48.974.000
2197.004	Pembinaan fungsional pengawasan ketenagakerjaan					28.330.000
140	Rapat koordinasi dan konsultasi					28.330.000
a.	Rapat koordinasi Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Kupang	Jakarta	5	Orang		28.330.000
2200	<b>Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial TK</b>					<b>229.200.000</b>
2200.002	Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Penempatan dan pelatihan Kerja					76.400.000
107	Pemeriksaan / Pengujian Norma Ketenagakerjaan	Provinsi NTT	1	Paket		76.400.000
2200.003	Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Hubungan kerja dan kebebasan berserikat					76.400.000
107	Pemeriksaan / Pengujian Norma Ketenagakerjaan	Provinsi NTT	1	Paket		76.400.000
2200.004	Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja					76.400.000
107	Pemeriksaan / Pengujian Norma Ketenagakerjaan	Provinsi NTT	1	Paket		76.400.000
2201	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan kesehatan Kerja</b>					<b>184.060.000</b>
2201.003	Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Ditjen Binawasnaker dan K3					50.596.000
130	Penyusunan /Perencanaan Program /Kegiatan/Anggaran	Bandung,Yogyakarta dan Jakarta	3	Kegiatan		50.596.000
2201.004	Peningkatan Tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal					30.264.000
115	Pelaksanaan pengelolaan keuangan	Kupang	12	Bulan		30.264.000
2201.994	Layanan Perkantoran					103.200.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kupang	12	Bulan		103.200.000
	<b>JUMLAH</b>					<b>551.826.000</b>

## 2. Bidang Ketransmigrasian

### PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik		Keuangan
			Target	Satuan	Pagu
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN</b>				8.104.300.000,00
5511	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya</b>				<b>300.495.000</b>
5511.001	Layanan Dukungan Manajemen Ditjen	Kupang, Jakarta, Jogjakarta	5	Kegiata	300.495.000
051	Penyusunan Program dan Anggaran				218.813.000
054	Pengelolaan Keuanga, Perbendaharaan	Kupang, Jakarta	12	Bulan	81.682.000
5512	<b>Pembangunan dan Pengembangan</b>				<b>840.035.000</b>
5512.001	Satuan Permukiman /Kawasan				815.560.000
052	Peningkatan Fasilitas Umum	Kab. Alor (Kaipera)	4	Unit	815.560.000
5512.008	Laporan/Koordinasi dengan KL dan				
051	Koordinasi dalam pembangunan dan	Kupang	1	Paket	24.475.000
5513	<b>Pengembangan Usaha Transmigrasi</b>				<b>925.305.000</b>
5513.001	Kawasan Trasmigrasi yang ditingkatkan				
051	Pengadaan Sarana dan prasarana				732.531.000
A.	Pengadaan Sarana dan prasarana				708.125.000
	Pejalanan Dinas	8 Lokasi (Sumba Barat,Alor,	24	OH	19.920.000
a.	UPT. Remangsifui	Kab. Alor	25	KK	118.125.000
b.	UPT. Wemaringi	Kab. Sumba Barat	25	KK	118.125.000
c.	UPT. Uluklubuk	Kab. Malaka	25	KK	118.125.000
d.	UPT. Ikiseo Gesu	Kab. Nagekeo	25	KK	168.750.000
e.	Lokasi Kapitan Meo (Baru)	Kab. Malaka	50	KK	50.000.000
f.	Lokasi Kapitan Meo (Pugar)	Kab. Malaka	25	KK	25.000.000
g.	Lokasi Kotakawao (Sp.5)	Kab. Sumba Timur	35	KK	35.000.000
h.	Lokasi Kotakawao (Sp.7)	Kab. Sumba Timur	75	KK	75.000.000
B.	Koordinasi pemantapan kegiatan	Kalimatan Barat (Pontianak)	1	Paket	4.486.000
052	Pengembangan Lembaga Ekonomi	Ikiseo Gesu (Nagekeo) Nagekeo	1	Paket	33.624.000
053	Fasilitas Penumbuh Wirausahawan	Ikiseo Gesu (Nagekeo) Nagekeo	1	Paket	159.150.000
5513.003	Prasarana dan sarana produksi,pasca				
052	Pengembangan Pasca Panen di KPB	Pontianak	1	OT	4.486.000
5514	<b>Pengembangan Sosial Badaya Transmigrasi</b>				<b>4.450.455.000</b>
5514.001	Satuan Permukiman /Kawasan				4.450.455.000
051	Pengadaan Catu pangan sesuai dengan	9 Kawasan (Palahonang,	1	Tahun	3.325.516.000
052	Fasilitas Layan Sosial di SP dan Kawasan Transmigrasi	Alor, Sumba Barat, Manggarai Barat, Nagekeo.	12	Bulan	869.324.000
054	Kelembagaan sosial budaya di Kawasan Transmigrasi yang berfungsi	NTT	1	Paket	255.615.000
5515	<b>Pelayanan Pertanahan Transmigrasi</b>				<b>1.538.010.000</b>
5515.001	Rekomendasi penerbitan sertifikat Hak				1.117.810.000
051	Pengurusan sertifikat tanah transmigrasi				1.117.810.000
a.	Inventarisasi Kepemilikan lahan (IP	Sikka (Lewomada)	1	Paket	52.550.000
		TTS (Kualin,Klus Kualin)	1	Paket	94.300.000
		Ende (Wewaria,Kolikapa)	1	Paket	52.550.000
		Sumba barat (Hobajonggi Wano kaka,	1	Paket	94.300.000
		Alor (Kaipera)	1	Paket	52.550.000
		Lembata (Lamalera)	1	Paket	52.550.000
		Flores Timur (Watangpao, Narasausina, Libu Adabang)	1	Paket	207.100.000
		Belu(Sanabibi)	1	Paket	52.550.000
b.	Pendamping pekerjaanLP	8 Lokasi	8	Paket	46.720.000
c.	Pendamping pekerjaan Kadastral	7 Lokasi	7	Paket	67.830.000
d.	Fasilitas Layanan Pertanahan	9 Kabupaten	57	Sertifika	56.970.000
e.	Koordinasi percepatan	12 Kabupaten	12	Kabupat	287.840.000
052	Ukur Bagi Lahan				420.200.000
a.	Pengukuran Lahan	Kapitan Meo (Baru) Malaka	1	Paket	84.040.000
		Kapitan Meo (Pugar) Malaka	1	Paket	84.040.000
		Remangsifui (Alor)	1	Paket	84.040.000
		Wemaringgi (Sumba Barat)	1	Paket	84.040.000
		Uluklubuk (Malaka)	1	Paket	84.040.000
5516	<b>Promosi dan Kemitraan</b>	NTT (Kota Kupang)	1	Paket	<b>50.000.000</b>
	<b>JUMLAH</b>				<b>8.104.300.000</b>

**PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI**

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik		Keuangan
			Target	Satuan	Pagu
	<b>PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN (Dana Tugas Pembantuan)</b>				<b>5.541.560.000</b>
5505.950	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA	KUPANG			<b>454.369.000</b>
053	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Kupang, Jakarta	1	Tahun	32.782.000
054	Pelaksanaan Pemantuan dan Evaluasi	Kupang, Jakarta	1	Tahun	25.361.000
055	Pengelolaan Data dan Informasi	Kupang, Jakarta	1	Tahun	19.891.000
056	Pengelolaan Keuangan	Kupang, Jakarta	1	Tahun	63.424.000
057	Pengelolaan Perbendaharaan	Kupang, Jakarta	1	Tahun	214.031.000
5505.994	Operasioanl dan Pemeliharaan Kantor	Kupang, Jakarta	1	Tahun	98.880.000
5506	PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK				<b>826.520.000</b>
053	Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi				<b>826.520.000</b>
	A. Perbekalan Transmigrasi	Malaka, Sumba Timur	175	KK	469.330.000
	B. Pelaksanaan dan Penempatan	Malaka, Sumba Timur	175	KK	15.000.000
	C. Persiapan Perpindahan dan Penempatan penerangan lokasi	Malaka, Sumba Timur	175	KK	342.190.000
		Mamuju			
5507	PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI				4.021.046.000
053	<b>Pembangunan Fasilitas Umum</b>				<b>3.316.665.000</b>
	<b>A. Pembangunan Fasilitas Umum</b>	<b>UPT. IKESU GEZU</b>			<b>1.258.705.000</b>
	1. Supervisi	<b>KAB. NGADA</b>	1	Pkt	33.705.000
	2. Perlengkapan Fasilitas Umum		3	Pkt	45.000.000
	3. Perlengkapan Gedung		1	Pkt	50.000.000
	4. Pembangunan Gedung SD		1	Unit	390.000.000
	5. Pembangunan Balai Desa		1	Unit	260.000.000
	6. Pembangunan Rumah Petugas		1	Unit	280.000.000
	7. Pembangunan Kantor Unit		1	Unit	200.000.000
	<b>B. Pembangunan Fasilitas Umum</b>	<b>UPT. WEMARINGGI</b>			<b>1.059.925.000</b>
	1. Supervisi	<b>KAB. SUMBA BARAT</b>	1	Pkt	29.925.000
	2. Perlengkapan Fasilitas Umum		2	Pkt	30.000.000
	3. Perlengkapan Gedung		1	Pkt	50.000.000
	4. Pembangunan Gedung SD		1	Unit	390.000.000
	5. Pembangunan Rumah petugas		1	Unit	280.000.000
	6. Pembangunan Pustu		1	Unit	280.000.000
	<b>C. Pembangunan Fasilitas Umum</b>	<b>UPT. SANABIBI</b>			<b>998.035.000</b>
	1. Supervisi	<b>KAB. BELU</b>	1	Pkt	28.035.000
	2. Perlengkapan Fasilitas Umum		2	Pkt	30.000.000
	3. Perlengkapan Gedung		1	Pkt	50.000.000
	4. Pembangunan Rumah Ibadah		1	Unit	220.000.000
	5. Pembangunan Rumah petugas		1	Unit	280.000.000
	6. Pembangunan Gedung SD		1	Unit	390.000.000
					390.000.000
056	<b>PEMBANGUNAN RTJK DAN SAB</b>				<b>515.253.000</b>
	Pembangunan SAB				<b>254.284.000</b>
	1. Supervisi	<b>UPT. IKESU GEZU</b>	1	Paket	8.284.000
	2. Gentong Plastik	<b>KAB. NGADA</b>	12	Unit	12.000.000
	3. Sumur Gali		4	Unit	34.000.000
	4. SAB Perpipaan		1	Paket	200.000.000
	Pembangunan SAB	<b>UPT. REMANGSIFUI</b>			<b>195.985.000</b>
	1. Supervisi	<b>KAB. ALOR</b>	1	Paket	5.985.000
	2. SAB Lanjutan		1	Paket	190.000.000
	Pembangunan SAB	<b>UPT. WEMARINGI</b>			<b>32.492.000</b>
	1. Supervisi	<b>KAB. SUMBA BARAT</b>	1	Paket	992.000
	2. Gentong Plastik		1	Paket	6.000.000
	3. Perpipaan		1	Paket	25.500.000
	Pembangunan SAB	<b>UPT. SANABIBI</b>			<b>32.492.000</b>
	1. Supervisi	<b>KAB. BELU</b>	1	Paket	992.000
	2. Gentong Plastik		1	Paket	6.000.000
	3. Hidran Umum		3	Unit	25.500.000
060	<b>LAPORAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN</b>	Kupang, Jakarta	1	Paket	<b>189.128.000</b>
		Malaka, Sumba Timur			
		Belu, Sumba Barat			
		Ngada, dan Alor			
5508	<b>PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI</b>				<b>239.625.000</b>
	A Pemeliharaan Tanah HPL	Temas, Kabupaten			
	- Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas HPL	Rote Ndao	1	Paket	200.000.000
	B fasilitasi Pelepasan Kawasan Hutan	Uluwae SP. 2			39.625.000
	- Identifikasi dan klarifikasi lokasi transmigrasi masuk kawasan hutan	Kab. Ngada	1	Paket	
					<b>5.541.560.000</b>

### 3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Bidang Pemberdayaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah.

#### PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik		Keuangan
			Target	Satuan	Pagu
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI</b>					<b>3.478.842.000</b>
2726	DUKUNGAN PEMBERDAYAAN UMKM DIDERAH				<b>3.478.842.000</b>
2.726.001					<b>936.587.000</b>
001	Dukungan Pemberdayaan UMKM di Daerah				<b>140.414.000</b>
051	Monitoring dan evaluasi kegiatan strategis				140.414.000
a.	Persiapan Rapat monitoring dan evaluasi program dan kegiatan strategis Kementerian Koperasi dan UKM	Kupang	1	Paket	2.897.000
b.	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan strategis kementerian Koperasi dan UKM	Kota Kupang, Kab Kupang, TTS,TTU,Belu,Malaka, Rite Ndao,Sabu Raijua, Alor, Lembata, Flotim, Sikka, End, Nagada dan Nagekeo, Manggarai dan Matim, Mabar, SBD, Sumba Barat dan Sumba Tengan, Sumba Timur.	18	KAB	120.654.000
c.	Rapat Forum pemantauan dan evaluasi program strategis	Jakarta	2	Orang	11.242.000
d.	Rapat Koordinasi pengaruh sutamaan gender (PUG)	Jakarta	1	Orang	5.621.000
002	Pengembangan Data KUMKM				<b>103.852.000</b>
051	Fasilitasi Pokja Pendataan KUMKM	Kupang	12	Bulan	43.800.000
052	Rapat Koordinasi data dan ODS System	Kupang	1	Paket	60.052.000
003	Perencanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM	Kupang	1	Tahun	<b>692.321.000</b>
051	Honorarium Pengelola Anggaran	Kupang	12	Bulan	105.840.000
053	Rapat Koordinasi Nasional	Bagka Belitung	1	Keg	18.780.000
054	Rapat Teknis Perencanaan	Kupang	1	Keg	11.242.000
055	Rapat Koordinasi Terbatas	Kupang	1	Keg	22.484.000
056	Rapat Penyusunan Anggaran Dekonsentrasi	Kupang	1	Paket	28.484.000
057	Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah	Kupang	1	Paket	449.407.000
058	Rapat Pengelola Anggaran	Kupang	12	Bulan	<b>56.084.000</b>
<b>2726.002</b>	<b>Satuan Tugas Pengawas Koperasi</b>				<b>200.341.000</b>
051	Honorarium Satuan Tugas Pengawas Koperasi	Kupang	12	Bulan	200.341.000
<b>2726.003</b>	<b>Operasional PLUT Di Daerah</b>				<b>818.154.000</b>
051	Fasilitasi PLUT di Daerah	Kupang	12	Bulan	818.154.000
2726.004	Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah	Kupang			231.440.000
051	Fasilitasi Smesco Galery	Kupang	1	Paket	231.440.000
<b>2726.005</b>	<b>Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan</b>				<b>1.292.320.000</b>
051	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Kupang	13	Bulan	1.292.320.000

4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dibiayai oleh Dana DPA SKPD Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

**DANA DPA SKPD**

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik		Keuangan
			Target	Satuan	Pagu
	DANA DPA SKPD				38.892.057.000
I	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI DAN TUNJANGAN)</b>		<b>14</b>	<b>Bulan</b>	23.415.018.000
II	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				15.477.039.000
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>2.103.668.000</b>
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kupang	1	Tahun	30.000.000
b.	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kupang	1	Tahun	442.060.000
c.	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kupang	1	Tahun	56.744.000
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kupang	1	Tahun	359.956.000
e.	Penyediaan jasa kebersihan	Kupang	1	Tahun	196.618.000
f.	Penyediaan alat tulis kantor	Kupang	1	Tahun	116.647.500
g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kupang	1	Tahun	59.200.000
h.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kupang	1	Tahun	18.900.000
i.	Penyediaan barang Bacaan dan Perundang-undangan	Kupang	1	Tahun	21.280.000
j.	Penyediaan makan dan minum	Kupang	1	Tahun	50.000.000
k.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kupang	1	Tahun	100.000.000
l.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan barang Dinas	Kupang	1	Tahun	35.900.000
m.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Daerah	Kupang	1	Tahun	100.000.000
n.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kupang	1	Tahun	399.400.000
o.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial (25 Tenaga Kontrak)	Kupang	1	Tahun	36.962.500
p.	Pendidikan dan pelatihan Formal	Kupang	1	Tahun	25.000.000
q.	Penyediaan Pameran Pembangunan	Kupang	1	Paket	55.000.000
2	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>608.750.000</b>
a.	Pembangunan Gedung Kantor	Kupang	1	Paket	100.000.000
b.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kupang			50.400.000
c.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kupang	7	Unit	80.000.000
d.	Pengadaan Meubelair	Kupang	27	Buah	25.000.000
e.	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Kupang	1	Tahun	145.000.000
f.	Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Kupang	1	Tahun	115.000.000
g.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (JAC)	Kupang	26	Unit	9.350.000
h.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kupang	1	Unit	34.000.000
i.	Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor	Kupang	1	Paket	50.000.000
3	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>	Kupang	1	Tahun	<b>40.678.000</b>

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik		Keuangan
			Target	Satuan	Pagu
4	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				12.723.943.000
	Program Pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan				12.723.943.000
	<b>Tenaga Kerja</b>				5.137.626.450
a.	Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha baru. (8 Paket)	Ende, SBD, Sumba Timur, Kupangm TTU,Belu, Rote Ndao, Malaka	240	Orang	883.716.900
b.	Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja di UPT. Pelatihan Tenaga Kerja (BLK)	Kab Kupng, TTS, Alor, Matim, Sumtim, Sumbar, Belu, TTU,Sumteng, Rate Ndao, Sabu Raijua	208	Orang	1.984.617.000
c.	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Pelatihan Tenaga Kerja	Kupang	1	Paket	477.411.550
d.	Rapat koordinasi/workshop penatalaksana penempatan daan	22 Kab/Kota	22	Kab/Kota	230.151.000
e.	Publikasi Informasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	Kupang	1	Paket	50.000.000
f.	Sidang Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit	Kupang	1	Keg	61.500.000
g.	Penyelesaian Kasus PHI/PHK di NTT	TTU,Malaka,SBD, Sikka,Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Ende,Manggarai, Ngada	160	Kasus	83.090.000
h.	Pemeriksaan dan Pengujian Norma kesehatan dan keselamatan	NTT	110	usaha	96.000.000
i.	Penanganan CTKI/TKI/AKAD akan dan Prosedur dan Bermasalah	NTT dan Luar NTT	1	Paket	100.000.000
j.	Operasional Terpadu Satu Atap (LTSA) penempatan dan	Kupang	1	Paket	208.000.000
k.	Operasional Posko Satgas TPPO di Bandara, Pelabuhan,	Kupang	1	Tahun	502.131.000
l.	Fasilitas Pengiriman Pelatihan Tenaga Kerja ke ke Luar NTT	22 Kab/Kota	150	Orang	49.700.000
m.	Rapat Teknis Pembentukan Pokja Pencegahan Terpadu PMI Non	22 Kab/Kota	22	Kab/Kota	411.309.000
	<b>Koperasi</b>				6.557.185.000
a.	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	22 Kab/Kota	50	Koperasi	1.240.770.000
b.	Pengembangan Jaringan Kerjasama usaha Koperasi	22 Kab/Kota	22	Kab/Kota	95.000.000
c.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	22 Kab/Kota	1424	Orang	4.238.780.000
d.	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kota Kupang	125	UKM	123.098.000
e.	Pengembangan sarana prasarana promosi hasil produksi	22 Kab/Kota	22	Kab/Kota	653.078.000
f.	Pelatihan Kewirausahaan	Kota Kupang	540	Orang	111.459.000
g.	Pembinaan ,penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha	22 Kab/Kota	22	Kab/Kota	95.000.000
	<b>Transmigrasi</b>				1.029.131.550
a.	Fasilitas Layanan Sosial Budaya	UPT. Walamdimu(SBD), Elopore Sumba Barat	2	Paket	72.250.000
b.	Pengembangan Usaha Masyarakat Transmigrasi	UPT. Laimbaru Kab. Sumba Timur, Kualin (TTS)	2	Paket	86.180.000
c.	Pengembangan pendidikan masyarakat transmigrasi	UPT. Adabang (Flotim), Wollu (Alor)	2	Paket	150.000.000
d.	Rapat Pendampingan Penyusunan penyusunan program	<b>Kota Kupang</b>	1	Keg	33.561.550
e.	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	<b>Sikka</b>	1	Dok	399.000.000
f.	Inventarisasi Pemanfaatan HPL	Sumba, Belu, Malaka,TTS,TTU	5	Lokasi	74.934.000
g.	Pengembangan Kelor dilokasi Transmigrasi	10 Lokasi	10	UPT	213.206.000
	<b>JUMLAH</b>				<b>38.892.057.000</b>

## 5. Rekapitan Dana secara keseluruhan yang menunjang Program dan Kegiatan Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN DPA SKPD (APBD)  
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019

		ANGGARAN
NO	SUMBER DANA / PROGRAM / SATKER / DPA	PAGU
		(Rp)
<b>A.</b>	<b>DANA DEKONSENTRASI</b>	<b>14.244.701.000</b>
I	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA &	4.133.293.000
II	PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	539.180.000
III	PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN	551.826.000
IV	PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN	5.541.560.000
V	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI	3.478.842.000
<b>B.</b>	<b>DANA APBN</b>	
I	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (TUGAS PEMBANTUAN)	<b>8.104.300.000</b>
<b>C.</b>	<b>DPA SKPD (APBD) PROVINSI</b>	<b>38.892.057.000</b>
	a. Belanja Tidak Langsung	23.415.018.000
	b. Belanja Langsung	15.477.039.000
	<b>TOTAL</b>	<b>61.241.058.000</b>

### B. PAGU ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi dana sebesar Rp.61.241.058.000,- dengan 3 jenis sumber dana yaitu Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.14.244.701.000,- Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 8.104,300,000,- dan Dana DPA SKPD Provinsi sebesar Rp. 38.892.057.000,-:

1. Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.14.244.701.000,- yang terdiri dari:
  - a. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas Prov. NTT sebesar Rp. 4.133.293.000,-
  - b. Program Pengembangan Hubungan Industrial Dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Prov. NTT dengan dana Rp. 539.180.000,-

- c. Program Perlindungan Tenaga Kerja Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dengan dana Rp. 551.826.000,-
  - d. Program Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dengan dana Rp. 5.541.560.000,-
2. Dana Tugas Pembantuan yaitu Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp. 8.104.300.000,-
  3. Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (APBD) sebesar Rp. 61.241.058.000,- .

## BAB VI

### DUKUNGAN OPERASIONAL

Asset penting yang dimiliki Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menunjang kelancaran tugas antara lain sebagai berikut :

#### 1. Asset/Modal

Asset penting yang dimiliki Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menunjang kelancaran tugas adalah:

- a. Kondisi Sarana dan Prasarana Eks Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT Per 31 Desember 2018.

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Sumber Dana	Kondisi
1	Tanah	7 Bidang	APBN	Baik
2	Bangunan	8 Unit	APBN	Baik
3	Kendaraan Dinas			
	- Roda 4	2 Unit	APBN & APBD	1 Baik, 1 rusak ringan
	- Roda 2	2 Unit	APBN	Baik
4	Alat Pendingin			
	- AC	31 Unit	APBD	11 Baik, 20 rusak ringan
5	Alat Komunikasi			
	- Telepon	3	APBN	Baik
	- Faximili	1	APBN	Baik
	- Telepon paralel	1	APBD	Baik
6	Alat Kantor Lainnya			
	- Tustel	3	APBN	2 baik, 1 rusak berat
	- Infocus & layar	4	APBN	2 baik, 2 rusak ringan

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Sumber Dana	Kondisi
	- Sound system -	4 unit	APBD	3 baik, 1 rusak berat
7	Alat Penggandaan - Mesin ketik manual	1	APBD	Baik
8	Alat Rumah Tangga lainnya - Wireless - TV Warna	1 1	APBD APBD	Rusak ringan Baik
9	Alat Penyimpanan Perlengkapan - Lemari besi/filling cabinet - Lemari arsip kayu - Rak arsip - Lemari perpustakaan - Lemari katalog - Lemari pakaian	11 8 6 2 1 20	APBD APBD APBD APBD APBD APBD	3 baik, 6 rusak 2 baik, 4 rusak ringan 4 baik 2 baik Rusak ringan 20 rusak ringan
10	Peralatan personil Computer - Computer	10	APBD	6 baik, 4 rusak ringan

Sumber Data : Sub Bagian Kepeg. Dan Umum

**b. Kondisi Asset Eks Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Per 31 Desember 2018**

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS TAHUN 2018					
PROVINSI	: PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR				
KAB/KOTA	:-				
S K P D	: DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT				
NOMOR	KODE BIDANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
URUT	BARANG			(Rp)	
1	01	TANAH	13	18.627.900.000	
2		PERALATAN DAN MESIN	1005	1.068.003.585	
	02	a. Alat-alat Besar			
	03	b. Alat-alat Angkutan			
	04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur			
	05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan			
	06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga			
	07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi			
	08	g. Alat-alat Kedokteran			
	09	h. Alat-alat Laboratorium			
	10	i. Alat-alat Keamanan			
3		GEDUNG DAN BANGUNAN	91	8.472.181.986	
	11	a. Bangunan Gedung			
	12	b. Bangunan Monumen			
4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	13	775.637.832,57	
	13	a. Jalan dan Jembatan			
	14	b. Bangunan Air/Irigasi			
	15	c. Instalasi Telepon			
	16	d. Jaringan			
5		ASET TETAP LAINNYA	1286	107.021.590	
	17	a. Buku Perpustakaan			
	18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			
	19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan			
6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	
		JUMLAH	2.408	29.050.744.993	

# **BAB VII**

## **P E N U T U P**

Program Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Rutin dan Pembangunan dilingkungan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan Pusat serta Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA Tahun Anggaran 2019 untuk dapat menjamin efisiensi dan efektivitas serta acuan penetapan prioritas pelaksanaan program tenaga kerja dan transmigrasi.

Kami menyadari bahwa didalam penyusunan program kerja ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga perlu dijabarkan secara lebih rinci dan teknis oleh masing-masing Unit/Bidang di lingkungan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk Program Kerja Bidang/UPT.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada kita semua.